

**ARAHAN LOKASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN  
TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KAWASAN PESISIR UTARA  
KABUPATEN SIKKA–NUSA TENGGARA TIMUR**

**TUGAS AKHIR**

Oleh :

**FRANSISKUS LAKA  
L2D 301 323**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS  
TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

## **Abstrak**

*Keberadaan potensi perikanan laut yang cukup besar di Kabupaten Sikka dengan pusat aktivitas perikanan di Kota Maumere sangat berpotensi untuk membangkitkan aktivitas ekonomi. Keberadaan aktivitas perikanan dan kelautan yang ada juga berdampak pada perkembangan ruang sebagai wadah bagi aktivitas tersebut berupa alokasi fisik bangunan dan sarana-prasarana pendukung kegiatan yang dimaksud. Pemerintah dalam hal ini memainkan peran yang penting dalam memajukan usaha perikanan, yakni menyediakan berbagai kemudahan dengan memberikan fasilitas penunjang keberhasilan usaha perikanan seperti kemudahan mendapatkan sarana produksi, mendaratkan hasil tangkapan, dan menjamin pemasaran, sehingga menjamin kelancaran sejak mulai produksi sampai pemasarannya. Salah satu sarana untuk mendukung pengembangan sektor perikanan khususnya kegiatan penangkapan ikan adalah dengan tersedianya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Adapun fungsi TPI yaitu sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil perikanan, sarana pemungutan retribusi hasil penangkapan ikan, serta sarana penyuluhan dan pengumpulan data perikanan. Namun keberadaan potensi perikanan serta perkembangan aktivitas perikanan yang ada di Kabupaten Sikka tidak ditunjang dengan pembangunan dan pemanfaatan sarana pemasaran yang ada. Pembangunan TPI Nangahure tidak termanfaatkan dan sekarang telah menjadi pangkalan angkatan laut. Tidak berfungsinya TPI dikarenakan karena faktor lokasi yang tidak sesuai. Karena tidak adanya kegiatan pelelangan pada TPI, maka berakibat pada rendahnya harga ikan hasil tangkapan oleh karena penawaran harga yang dilakukan secara tertutup oleh pembeli, yang berimbas pada kesejahteraan nelayan dan perkembangan usaha perikanan tangkap. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas serta perlunya pembangunan sarana penunjang kegiatan perikanan tangkap, khususnya TPI dalam memacu aktivitas usaha perikanan, maka studi ini bertujuan mengkaji: “Bagaimana Arah dan Strategi Lokasi TPI di Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Sikka – Nusa Tenggara Timur.*

*Adapun metodologi penelitian yang dipakai meliputi: pengumpulan, pengolahan dan penyajian data adalah pengumpulan data dilakukan melalui survai lapangan maupun instansi terkait yang berkompeten, pengolahan data dilakukan secara manual maupun dengan bantuan piranti komputer dan penyajian data dan hasil analisis dilakukan melalui penulisan hasil observasi, pengeditan, pengkalsifikasian, reduksi dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah metode pengambilan sampel acak distratifikasi dengan pengelompokan antara lain masyarakat nelayan; pengusaha, pedagang dan konsumen lokal serta instansi lembaga pemerintah terkait. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah metode penskoran untuk menentukan preferensi pelaku dan daya dukung fisik kawasan; metode Indeks Sentralitas Marshall untuk menentukan keterpusatan fasilitas; metode deskriptif kualitatif untuk menentukan kecenderungan pergerakan dan metode SWOT untuk menentukan strategi berdasarkan potensi kendala yang ada pada lokasi.*

*Sebelum dilakukan analisis, maka dilakukan identifikasi kriteria-kriteria lokasi TPI, identifikasi lokasi alternatif dan analisis lokasi optimal TPI. Berdasarkan kajian teori, maka kriteria-kriteria lokasi TPI adalah kriteria fisik, kriteria sosial-ekonomi, kriteria perilaku dan kriteria teknologi. Dari sebaran 45 titik lokasi yang ada di Pesisir*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan potensi sumberdaya perikanan sebagai sumberdaya alam di Indonesia sangat potensial untuk memacu pembangunan ekonomi wilayah pesisir dan sekitarnya. Pada saat ini pemerintah mulai peduli terhadap pembangunan sektor perikanan. Hal ini dilandasi oleh beberapa alasan pokok, yaitu: *pertama*, sumberdaya perikanan yang meliputi ikan, perairan dan lahan masih cukup melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal; *kedua*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor perikanan, walaupun terbilang relatif kecil peranannya, terlihat kecenderungan yang semakin meningkat dibandingkan dengan subsektor lainnya dibidang pertanian; *ketiga*, dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) pada tahun 1999 dan pada *reshuffle* kabinet tahun 2000 berganti nama menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pemerintah terus melakukan upaya pengembangan pada sektor perikanan dan kelautan.

Dalam upaya pengembangan sektor perikanan, pemerintah memainkan peran penting. Salah satu peran penting tersebut adalah menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan usaha perikanan. Adapun kemudahan-kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan mendapatkan sarana produksi, mendaratkan hasil tangkapan, dan menjamin pemasaran, sehingga poses produksi sampai pemasarannya berjalan lancar.

Terkait dengan pendaratan hasil tangkapan dan jaminan pemasaran, maka salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan khususnya kegiatan penangkapan ikan adalah tersedianya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Adapun fungsi TPI yaitu sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil perikanan, sarana pemungutan retribusi hasil penangkapan ikan, serta sarana penyuluhan dan pengumpulan data perikanan. Fungsi TPI seperti tersebut di atas dinilai cukup strategis, karena dengan adanya pelelangan persaingan harga produksi semakin tinggi dan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan dari usaha penangkapan ikan. Peningkatan pendapatan berdampak pada peningkatan kesejahteraan yang pada gilirannya akan memacu semangat usaha di sektor perikanan.

Secara fisik Kabupaten Sikka diapit oleh Laut Flores di Kawasan Pesisir Utara dan Laut Sawu di Pesisir Selatan. Secara geografis dari 6 (enam) kabupaten yang ada di Pulau Flores, ibu kota Kabupaten Sikka yaitu Kota Maumere merupakan satu-satunya ibu kota kabupaten yang terletak di Kawasan Pesisir Utara dan berhadapan langsung dengan Laut Flores, sedangkan dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Sikka tujuh di antaranya terletak di Kawasan Pesisir Utara.

Laut Flores merupakan salah satu wilayah laut yang ramai dan potensial dengan kegiatan perikanan tangkap di Indonesia. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Flores, maka aktivitas perikanan tangkap di Kawasan Pesisir Utara cukup berkembang pesat bila dibandingkan dengan wilayah lain dalam lingkup Pulau Flores-Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini terkait erat dengan letaknya yang strategis yaitu berhadapan dengan Laut Flores yang dapat menghubungkannya dengan wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumbawa, Pulau Bali, Pulau Jawa dan Kepulauan Maluku, serta keberadaan Laut Flores sebagai salah satu kawasan yang secara nasional memiliki potensi perikanan yang tinggi, serta aktivitas penangkapan ikan yang cukup tinggi.

Menurut Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2002, perairan laut yang mengapit Kabupaten Sikka memiliki luas 5.821.332 Km<sup>2</sup> dan Potensi Lestari Sumberdaya (MSY) perikananannya sebesar 21.175 ton/tahun, yang didominasi oleh berbagai jenis ikan-ikan pelagis besar seperti: cakalang, tuna, tongkol dan cucut, serta ikan pelagis kecil seperti: kembung, layang, selar, ikan terbang dan ikan teri. Disamping itu terdapat ikan-ikan demersal yang bernilai ekonomi tinggi seperti: bambangan, kakap dan kerapu. Hingga tahun 2002 sumberdaya hayati perikanan yang dimanfaatkan baru sekitar 8.230,2 ton atau baru mencapai 38,87% dari potensi lestari (MSY). Peluang untuk pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan masih sangat besar. Dari 3.215 armada penangkapan ikan pada tahun 2002, 2.307 unit di antaranya merupakan perahu tanpa motor, 376 unit motor tempel dan 532 unit kapal motor. Sedang alat tangkap masih didominasi oleh jaring insang (23,43%) dan pancing (64,03%).

Namun keberadaan potensi perikanan serta perkembangan aktivitas perikanan yang ada tidak ditunjang dengan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan. Sebagai buktinya adalah Kabupaten Sikka hanya memiliki satu TPI, yakni TPI

Nangahure yang keberadaannya tidak termanfaatkan dan sekarang telah beralih fungsinya menjadi pangkalan angkatan laut.

Permasalahan yang muncul menyangkut penempatan lokasi TPI dengan perkembangan aktivitas perikanan tangkap di Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Sikka adalah:

- (1) Jika tidak ada TPI, maka penawaran harga produksi tangkapan ikan dilakukan antara penjual dan pembeli secara tertutup, bukan melalui penawaran terbuka sehingga harga produksi ditekan secara sepihak oleh pembeli/pedagang; pendapatan pemerintah berupa retribusi pelelangan ikan tidak dapat diperoleh, karena tidak tersedia jasa pelelangan ikan;
- (2) Jika menggunakan TPI Nangahure yang sekarang ada, maka pelelangan ikan tidak akan berjalan optimal karena hampir dipastikan bahwa tidak akan terjadi transaksi, mengingat nelayan tidak menyukai lokasi tersebut oleh karena jarak tempuh, aksesibilitas serta kondisi perairan yang agak terbuka dan sekarang telah digunakan untuk pangkalan angkatan laut;
- (3) Walaupun dipaksakan, maka kemungkinan adalah sebagian nelayan dan pedagang akan melakukan transaksi di luar lokasi TPI, pemerintah memperoleh retribusi pelelangan ikan, namun tidak sesuai target serta mubasirnya sarana yang ada.

Beberapa faktor yang menjadi indikasi penyebab tidak berkembangnya TPI dimaksud adalah:

- Pembangunan TPI yang ada sekarang merupakan bagian dari program relokasi permukiman nelayan dari Kelurahan Wolomarang ke Nangahure Kelurahan Wuring, namun program relokasi tersebut tidak berhasil termasuk pemanfaatan fasilitas TPI yang ada. Karena program relokasi yang tidak berjalan, maka pada lokasi dimaksud tidak ada permukiman nelayan, sehingga jarak tempuh ke TPI yang ada relatif cukup jauh ( $\pm 4 - 5$  Km) bila dibandingkan dengan lokasi transaksi yang ada secara alamiah;
- Kurang sosialisasi fungsi dan peran TPI oleh instansi terkait serta masyarakat nelayan yang sudah terbiasa menjual langsung hasil tangkapan kepada para pembeli baik perusahaan maupun perorangan;
- Kurang tersedianya sarana-prasarana pendukung yang memungkinkan pengguna tertarik untuk menggunakan sarana TPI dan belum adanya badan atau organisasi yang mengelola TPI tersebut dan kejelasan penegakan peraturan dalam pemanfaatannya.